

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 170 TAHUN 2020

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS/RELAWAN
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. sebagai penyuluh, menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
2. sebagai inisiator, menginisiasi atau memprakarsai tentang program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
3. sebagai fasilitator, memberikan bantuan dalam memperlancar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN); dan
4. sebagai penghubung antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM SATUAN
TUGAS/RELAWAN ANTI
NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 170 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 Agustus 2020

TIM SATUAN TUGAS/RELAWAN
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
Ketua Pengarah	: Roni Dwi Susanto	Kepala LKPP
Wakil Ketua Pengarah	: Setya Budi Arijanta	Sekretaris Utama LKPP
Anggota Pengarah	: 1. Gusmelinda Rahmi 2. Suharti 3. Gatot Pambudhi Poetranto	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Koordinator	: 1. Edi Kristiyanto 2. Hardi Afriansyah 3. Miftah Irfaniah 4. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 5. Festiana Niyanti	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
Sekretaris	: Resa Anggriani	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sari Melani 2. Muhammad Darwis Rambe 3. Rinaldy Prihandoko 4. Doddy Pascal 5. Yustitia Fernando 6. Yogie Prastiyans 7. I Nyoman Aditya Wicaksana 8. Muhammad Yusuf Chandra Nugraha 9. Mexi Osmond Soyan 10. Annisa Putri 11. Manshur Riadli 12. Hima Tussafinah 13. Mahendra Gilang Ramadhynara 14. L. Rani Esi Hapsari 15. Vicky Virgiran Pamungkas 16. Cecep Hendar Supriyadi 	<p>Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat</p> <p>Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Inspektorat</p> <p>Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</p> <p>Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah</p> <p>Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum</p> <p>Direktorat Sertifikasi Profesi</p> <p>Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan</p> <p>Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum</p> <p>Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian</p> <p>Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus</p> <p>Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional</p> <p>Direktorat Pengembangan Sistem Katalog</p> <p>Biro Umum dan Keuangan</p> <p>Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana</p>
---------	---	---	--

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO